



PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti
email : kaffah03@yahoo.com

ABSTRACT

The Government Accounting Standards become the benchmark in the preparation of government financial statements, so it is necessary to apply the appropriate accounting standards so that the financial reports generated can be used correctly. The 2019 Cybersecurity and National Security Agency (BSSN) Financial Report has received a WDP (Rational With Exceptions) opinion because the BSSN has not fully implemented government accounting standards, constraints in compiling financial reports, or errors in the performance of agencies. The study entitled "Effects of Application of Government Accounting Standards and Quality of Financial Reporting on Accountability of Performance of Government Institutions BSSN", aims to find out to what extent the application of government accounting standards and the quality of financial reporting influence on accountabilities of performance of government institutions based on the problems that arise.

The field research was conducted using a quantitative approach and population research is the BSSN Financial Reporting Team. The study involved 33 respondents. This research data is collected using a questionnaire method. The author uses the double linear regression test and the hypothesis test with the SPSS

27 program.

The results of this study lead to the conclusion that the financial reporting quality variables have a significant influence on the accountability of the performance of government agencies. Financial reporting quality variable with a significance value of $0.012 < 0.05$ and a tstatistic value of $2.261 > t_{table} 2.042$. Different from the variable application of government accounting standards that influences but is not significant on the accountability of the performance of government agencies because it has a significant value of $0.564 > 0.05$, and the tstatistic value of $-0.584 < t_{table} 2.042$.

Keywords: Government Accounting Standards, Financial Reporting Quality, Accountability Performance of Government Agencies

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintah diyakini akan berdampak pada

peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Ini artinya informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Dalam siklus APBN, setiap tahunnya akan ada periode pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di tahun yang berkenaan. Bentuk pertanggungjawaban bagi setiap Pengguna Anggaran adalah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

* Mahasiswa Universitas Mitra Bangsa ** Dosen Universitas Mitra Bangsa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

LKKL yang telah disusun nantinya akan diaudit oleh auditor eksternal, untuk dinilai kewajaran dan kelayakan penyajiannya. Sudah barang tentu, Kementerian/Lembaga (K/L) harus berusaha untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB pada tahun 2019 menunjukkan bahwa BSSN memperoleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 64,05 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada BSSN menunjukkan hasil yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Hasil Penilaian SAKIP BSSN Tahun 2019

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,46	22,00
b.	Pengukuran Kinerja	25	11,91	12,27
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,27	10,29
d.	Evaluasi Internal	10	6,61	6,78
e.	Capaian Kinerja	20	12,29	12,71
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,54	64,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber: KemenPAN-RB Tahun 2019

Dari tabel di atas secara garis besar terlihat bahwa rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya hanya sebagian yang sudah ditindaklanjuti, meskipun belum tuntas diimplementasikan. Kondisi ini mengakibatkan tidak terjadi kemajuan yang signifikan dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam 2 tahun terakhir. Di samping itu pada aspek evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja di unit kerja walaupun sudah dilakukan, namun hasil dari evaluasi tersebut belum dijadikan bahan perbaikan akuntabilitas kinerja.

KAJIAN TEORI

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintah adalah upaya yang konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara berupa penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar.

2. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

3. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing – masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Tujuan dari realisasi anggaran adalah untuk menetapkan dasar – dasar penyajian laporan realisasi anggaran bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

4. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas Berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.
5. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut maka laporan keuangan harus dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan.
6. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Aset tetap adalah aset yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Kontruksi dalam pengerjaan adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan. Contohnya tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu. Periode waktuperolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri atau melalui pihak ketiga dengan kontrak kontruksi.
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya yang mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam pemerintahan, kewajiban muncul karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintahan juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan.
10. PSAP Nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan
Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada data atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Mungkin kesalahan yang timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan penghitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar, kesalahan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

11. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur – unsur yang terdapat dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer dan pos – pos luar biasa. Tujuan dari pernyataan standar ini adalah menetapkan dasar – dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan hasil (output) sedangkan masukannya (input) berupa transaksi bisnis. Supaya masuk ke dalam system pencatatan, maka seluruh input harus dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi (Toto Prihadi, 2019:44).

Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010):

Adapun penjelasan dari karakteristik kualitas laporan keuangan sesuai Peraturan Presiden No 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Perwujudan pertanggung jawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 secara singkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan LAKIP. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah intinya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam

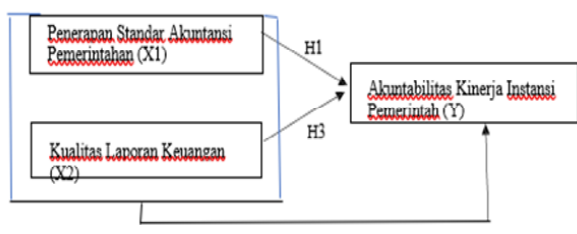
memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Penyelenggaraan SAKIP diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Selanjutnya, dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Selanjutnya, dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dijelaskan penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- Rencana Strategis;
- Perjanjian Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pengelolaan data kinerja;
- Pelaporan Kinerja; dan
- Reviu dan evaluasi kinerja.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah sebuah model konseptual mengenai hubungan suatu teori dengan berbagai faktor atau variabel yang diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Secara teoritis perlu dijelaskan mengenai hubungan variabel independen dengan dependen.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

1. Uji Validitas

Kegunaan uji ini untuk menghitung keefektifan atau sah tidaknya suatu kuesioner. Penelitian dianggap sah jika pertanyaan dalam penelitian itu dapat menjelaskan suatu yang diukur oleh penelitian itu. Jika hasil yang didapatkan menyatakan r hitung lebih besar daripada dengan r tabel dimana $df = n-2$ dengan signifikan 5% jika r -hitung > r -tabel maka valid dan juga sebaliknya (Ghozali, 2021).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu media dalam menghitung suatu angket yang merupakan indikator dari suatu komposisi. Reliabilitas dapat dianalisis dengan mengukurnya sekali kemudian

membandingkan hasil yang diperoleh dengan pertanyaan lain dengan memakai SPSS yaitu uji cronbach alpha (α). Dalam mengukur reliabilitas, suatu variabel dibilang reliabel secara statistik jika nilai konstantanya lebih dari 0,6. Menurut Ghozali (2021) suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha (α) > 0,6.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = ($N-2$), $N = 33$. Jadi $df = 33-2 = 31$ dengan α (alpha) 5% (0,05) didapat r tabel = 0,2913. Jika r tabel < r hitung maka pertanyaan bisa dikatakan sah. Uji validitas menggunakan korelasi melalui bantuan SPSS Statistics versi 27. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari tiga variabel dengan 33 responden adalah sebagai berikut:

- Variabel Penerapan Penerapan standar akuntansi pemerintahan ($X1$)

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi

No	Variabel	Indikator	r tabel	r hitung	Ket
1.	X1=Standar Akuntansi Pemerintah	X1.1	0,2913	0,722	Valid
		X1.2	0,2913	0,669	Valid
		X1.3	0,2913	0,482	Valid
		X1.4	0,2913	0,410	Valid
		X1.5	0,2913	0,759	Valid
		X1.6	0,2913	0,628	Valid
		X1.7	0,2913	0,777	Valid
		X1.8	0,2913	0,757	Valid
		X1.9	0,2913	0,508	Valid
		X1.10	0,2913	0,521	Valid

Sumber: diolah dari data SPSS 27

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa semua pernyataan tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan dari X1.1 sampai X1.10 dapat dikatakan valid karena koefisien korelasi r hitung > koefisien korelasi r tabel dengan signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan semua pernyataan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid dan dapat diartikan sebagai alat pengumpulan data dan dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

2. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X2)

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas
Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X2)

No	Variabel	Indikator	r_{tabel}	r_{hitung}	Ket
2.	X2 = Kualitas Laporan	X2.1	0,2913	0,657	Valid
		X2.2	0,2913	0,742	Valid
		X2.3	0,2913	0,637	Valid
		X2.4	0,2913	0,523	Valid
		X2.5	0,2913	0,502	Valid
		X2.6	0,2913	0,683	Valid
		X2.7	0,2913	0,630	Valid
		X2.8	0,2913	0,661	Valid

Sumber: diolah dari data SPSS 27

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa semua pernyataan tentang kualitas laporan keuangan dari X2.1 sampai X2.8 dapat dikatakan valid karena koefisien korelasi $r_{\text{hitung}} > \text{koefisien korelasi } r_{\text{tabel}}$ dengan signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan semua pernyataan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid dan dapat diartikan sebagai alat pengumpulan data dan dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

3. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas
Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi

No	Variabel	Indikator	r_{tabel}	r_{hitung}	Ket
3.	Y=Akuntabilitas Kinerja Instansi	Y.1	0,2913	0,704	Valid
		Y.2	0,2913	0,785	Valid
		Y.3	0,2913	0,653	Valid
		Y.4	0,2913	0,758	Valid
		Y.5	0,2913	0,552	Valid
		Y.6	0,2913	0,772	Valid
		Y.7	0,2913	0,620	Valid
		Y.8	0,2913	0,686	Valid
		Y.9	0,2913	0,618	Valid
		Y.10	0,2913	0,602	Valid

Sumber: diolah dari data SPSS 27

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa semua pernyataan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Y.1 sampai dengan Y.10 dapat dikatakan valid karena koefisien korelasi $r_{\text{hitung}} > \text{koefisien korelasi } r_{\text{tabel}}$ dengan signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan semua pernyataan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid dan dapat diartikan sebagai alat pengumpulan data dan dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu media untuk menghitung suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau komposisi. Untuk mengukur reliabilitas,

variabel atau konstruk dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ maka menurut Ghazali (2021:45) variabel tersebut reliabel secara statistik. Tabel berikut menunjukkan hasil uji reabilitas semua variabel terhadap 33 responden Tim Penyusun Laporan Keuangan Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan SPSS versi 27 sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1)

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Penerapan Standar Akuntansi

No	Variabel	Standar Reliabilitas	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	X1 = Standar Akuntansi	0,60	0,872	Reliabel

Sumber: diolah dari data nilai Cronbach's Alpha SPSS 27

Berdasar tabel di atas memperlihatkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) reliabel karena nilai cronbach's alpha $> 0,60$ yaitu sebesar 0,872. Jadi dapat disimpulkan bahwa data variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner sudah reliabel atau handal. Artinya, responden standar akuntansi pemerintah dalam menjawab pertanyaan tentang SAP sudah konsisten dan tidak berubah- ubah dari waktu ke waktu dan jika pengujian data diulang kembali maka hasilnya tetap tidak akan berubah sehingga data X1 dikatakan reliabel atau handal dan dapat dilakukan uji berikutnya.

2. Kualitas Laporan Keuangan (X2)

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X2)

No	Variabel	Standar Reliabilitas	Cronbach's Alpha	Keterangan
2.	X2 = Kualitas Laporan	0,60	0,777	Reliabel

Sumber: diolah dari data nilai Cronbach's Alpha SPSS 27

Berdasar tabel di atas memperlihatkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan (X2) reliabel dikarenakan nilai cronbach's alpha $> 0,60$ yaitu sebesar 0,777. Jadi dapat disimpulkan bahwa data Kualitas Laporan Keuangan (X2) yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner sudah reliabel atau handal. Artinya, responden kualitas laporan keuangan dalam menjawab pertanyaan tentang kualitas laporan keuangan sudah konsisten dan tidak berubah – ubah dari waktu ke waktu dan jika pengujian data diulang kembali maka hasilnya tetap akan sama sehingga data X2 dikatakan reliabel atau handal dan dapat dilakukan uji berikutnya.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Variabel	Standar Reliabilitas	Cronbach's Alpha	Keterangan
3.	Y = Akuntabilitas Kinerja	0,60	0,866	Reliabel

Sumber: diolah dari data nilai Cronbach's Alpha SPSS 27

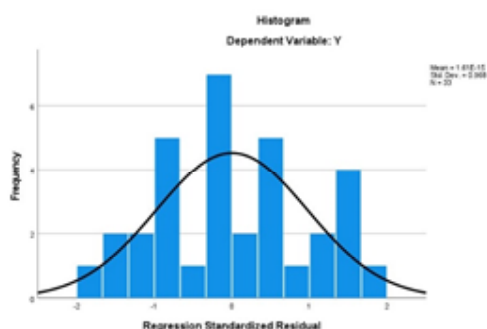
Berdasar tabel di atas memperlihatkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) reliabel karena nilai cronbach's alpha > (yaitu sebesar 00,866. Artinya, responden akuntabi kinerja instansi pemerintah (Y) dalam menjawab pertanyaan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah konsisten dan tidak berubah – u dari waktu ke waktu dan jika pengujian data diul kembali maka hasilnya tetap akan sama sehina data akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikatakan reliabel atau handal dan dapat dilaku uji berikutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah agar mengetahui didalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal. Uji parsial serta simultan memprediksi bahwasannya nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalamelanggar prediksi uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel kecil. Grafik histogram dari 33 responden diperoleh gambaran sebagai berikut:

Gambar 4.2 Regression Standardized Residual



Berdasarkan grafik histogram di atas terdapat pola distribusi data yang melenceng ke kanan (cenderung ke kanan) yang artinya data terdistribusi normal.

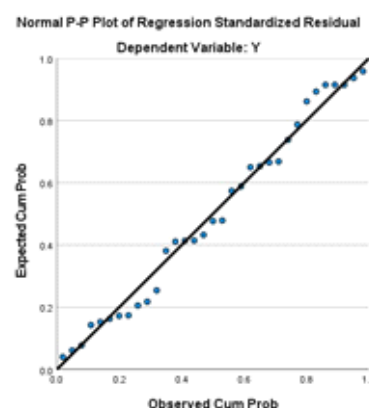
Menurut Ghozali (2021) salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat his-

togram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.

Menurut Ghozali (2021) metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Grafik histogram dari 33 responden diperoleh gambaran sebagai berikut:

Gambar 4.3 Normal P-Plot of Regression Standardized Residual



Dari grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, menurut Ghozali (2021) bahwa jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kesimpulannya model regresi berdistribusi normal.

Dalam uji normalitas menggunakan uji kolmogorov smirnov yaitu uji yang valid dan efektif untuk sampel berjumlah kecil. Dasar pengujian keputusan uji normalitas yaitu:

- Jika signifikan < 0,05, maka dikatakan tidak normal.
- Jika signifikan > 0,05, maka data dikatakan normal.

Berikut hasil uji normalitas pada responden Tim Penyusun Laporan Keuangan Badan Siber dan Sandi Negara diuji menggunakan SPSS versi 27.

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas
Kolmogrov-Smirnov

Standar Normalitas	Asymp Sig	Keterangan
0,05	0,200	Terdistribusi Normal

Sumber: diolah dari data SPSS 27

Berdasar tabel di atas diperoleh data bahwa nilai Asymp Sig sebesar 0,200 lebih besar dari pada 0,05 kemudian ditarik kesimpulan dalam model regresi ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolonieritas

Menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel independen itulah tujuan dari uji multikolonieritas. Untuk menguji gejala multikolonieritas dengan melihat tolerance value atau variabel Inflation Factor (VIF) dengan kriteria sebagai berikut:

- Apabila tolerance value $> 0,1$ dan $VIF < 10$ maka tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independen.
- Apabila tolerance value $< 0,1$ dan $VIF > 10$ maka terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independen.

Berikut hasil pengujian terhadap 33 responden Tim Penyusun Laporan Keuangan BSSN diuji menggunakan SPSS versi 27.

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.544	8.760		1.432	.162		
	X1	-.141	.242	-.140	-.584	.564	.409	2.444
	X2	.992	.373	.640	2.661	.012	.409	2.444

a. Dependent Variable: Y

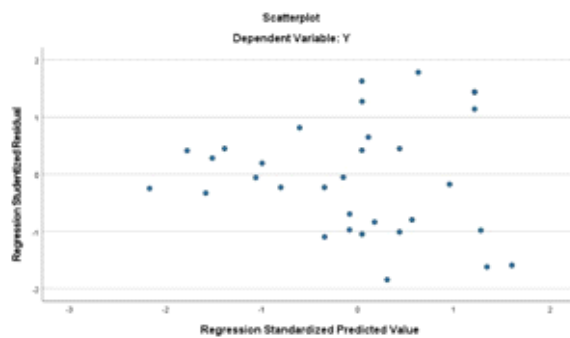
Sumber: Hasil olah data SPSS 27

Berdasar tabel di atas memperlihatkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) mendapat nilai tolerance $0,409 > 0,1$ dan nilai $VIF 2,444 < 10$ sehingga gejala multikolonieritas tidak terjadi. Variabel kualitas laporan keuangan (X2) mendapat nilai tolerance $0,409 > 0,1$ dan nilai $VIF 2,444 < 10$ gejala multikolonieritas tidak terjadi. Variabel independen dalam penelitian ini diartikan tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan. Model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain homoskedastisitas itu model regresi yang baik. Penelitian ini menggunakan metode diagram scatterplot dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dengan residual. Jika terdapat polatertentu yang teratur maka mendeskripsikan ada gejala heteroskedastisitas. Apabila pola atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

Gambar 4.4 Grafik Uji Heterokedastisitas



Sumber: Hasil olah data SPSS 27

Menurut Ghozali (2021) tidak terjadi heteroskedasitas, jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar Scatterplot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Dari Scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik tersebut tersebar secara acak dan tidak terkonsentrasi pada satu tempat. Hal ini membuktikan bahwa tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Interprestasi Hasil

Hasil Uji R dan R Square

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai R square yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Tabel berikut menunjukkan hasil uji koefisien determinasi R square.

Tabel 4. 12 Hasil Uji R dan R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.539 ^a	.291	.243	3.520	1.972

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil olah data SPSS 27

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai R sebesar $0,539$ atau $53,9\%$ berarti kemampuan menjelaskan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan kualitas laporan keuangan (X2) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) pada BSSN cukup baik karena mendekati nilai satu.

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,291 atau 29,1 %. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan Variabel kualitas laporan keuangan (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 29,1%. Sedangkan sisanya (100%- 29,1%) =70,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Pada tabel Model Summary memperlihatkan tingkat keakuratan model regresi dapat dilihat pada kolom Standard Error of The Estimate, tertera angka 3,520. Nilai ini semakin mendekati angka 0 (nol) semakin akurat, dengan angka sebesar itu maka dapat dikatakan model yang terbentuk akurat sebesar 96, 48% (3,520 x 100%).

Hasil Uji Statistik T

Menurut Imam Al Ghazali (2021) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik T

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients	Standard Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B			Beta			Tolerance VIF
1	(Constant)	12.544	8.760		1.432	.162	
	X1	-.141	.242	-.140	-.584	.564	.409 2.444
	X2	.992	.373	.640	2.661	.012	.409 2.444

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data olahan SPSS 27

Kriteria pengujian t yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha1 diterima (koefisien regresi signifikan hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen).

Berdasarkan hasil uji t dari hasil pengolahan data SPSS 27 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Diketahui bahwa nilai sig. koefisien penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) adalah sebesar 0,564. Dengan demikian, signifikansi > dari 0,05 (0,564 > 0,05) maka H01 diterima dan Ha1 ditolak.

Berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai thitung variable penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) adalah sebesar -0,584. Oleh karena nilai thitung - 0,584 < nilai ttabel 2,042 , maka dapat disimpulkan bahwa H01 diterima dan Ha1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

2. Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Diketahui bahwa koefisien sig. kualitas laporan keuangan (X2) sebesar 0,012. Dengan demikian, signifikansi < 0,05 (0,012 < 0,05) maka Ha2 diterima dan H02 ditolak.

Berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai thitung variable kualitas laporan keuangan (X2) adalah sebesar 2,261. Oleh karena nilai thitung 2,261 > nilai ttabel 2,042 , maka dapat disimpulkan bahwa Ha2 diterima dan H02 ditolak

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hasil ini konsisten dengan kerangka teori yang menjelaskan karakteristik kualitas laporan keuangan, seperti relevansi dan keandalan

Uji F (Simultan)

Dalam memperlihatkan apakah keseluruhan variabel bebas yang dipakai ke dalam model mempunyai pengaruh semua terhadap variabel terikat itulah tujuan dari uji simultan.

Hasil uji terhadap 33 Responden Tim Penyusun Laporan Keuangan BSSN diuji menggunakan SPSS 27 diperoleh data:

Tabel 4.14 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	152.435	2	76.217	6.150
	Residual	371.807	30	12.394	
	Total	524.242	32		

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: diolah dari data SPSS 27

Dengan hipotesis :

H03 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara.

Ha3 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara.

Berdasarkan output tabel di atas, diketahui nilai sig. sebesar 0,006, karena nilai sig. $0,006 < 0,05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F (simultan) dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha3 diterima atau dengan kata lain variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan variable kualitas laporan keuangan (X2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Berdasarkan out put tabel SPSS di atas dapat dilihat Fhitung sebesar 6,150 berarti nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu yang diperoleh dari Ftabel $= (k; n-k)$, F tabel $= (2; 33-2)$ maka F tabel $= (2; 31)$ yaitu 3,305. Hal ini menunjukkan F hitung $> F$ tabel $= 6,150 > 3,305$.

Berdasarkan kedua kreteria tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha3 diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan) terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) secara simultan.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda dipergunakan guna mengetahui keterkaitan antar variabel terikat dengan variabel tidak terikat.

Tabel 4.15

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,544	8,760		1,432	,162		
	X1	-.141	,242	-.140	-.584	,564	,409	2,444
	X2	,992	,373	,640	2,661	,012	,409	2,444

a. Dependent Variable: Y

Sumber: diolah dari data SPSS

Berdasar output di atas, hasil dari persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 12,544 - 0,141 + 0,992 + e$$

Dengan konstanta sebesar 12,544, koefisien penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) sebesar -0,141, koefisien kualitas laporan keuangan (X2) sebesar 0,992. Persamaan regresi di atas bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) = 12,544

Nilai konstanta sebesar 12,544 menunjukkan bahwa jika koefisien penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan kualitas laporan keuangan (X2) adalah 12,544 maka tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara sebesar 12,544.

2. Koefisien standar akuntansi pemerintahan (X1) = -0,141

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan antara kedua variabel. Jika penerapan standar akuntansi pemerintahan dinaikkan satu satuan penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan terjadi penurunan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mengalami penurunan sebesar 0,141, dengan asumsi bahwa variabelindependen yang lainnya tetap. Koefisien yang mempunyai nilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Koefisien kualitas laporan keuangan (X2)= 0,992
- Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah positif. Jika kualitas laporan keuangan dinaikkan satu satuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka akan terjadi peningkatan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,992, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap. Koefisien yang mempunyai nilai positif berarti terjadi hubungan positif antara kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan negatif antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara. Sedangkan Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah terjadi hubungan positif. Jika kualitas laporan keuangan dinaikkan satu satuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka akan terjadi peningkatan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BSSN sebesar 0,992.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak memiliki pengaruh signifikan atau memiliki pengaruh signifikan tetapi sangat kecil terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara. Maka hipotesis Ha1 ditolak.
2. Kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis kedua (Ha2) diterima. Hal ini membuktikan bahwa semakin berkualitas laporan keuangan, berpengaruh tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah akan semakin tinggi.
3. Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara. Maka hipotesis Ha3 diterima.

Keterbatasan

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan peneliti yang akan datang untuk memperbaiki penelitian ini. Beberapa keterbatasan penelitian tersebut, antara lain:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi dalam penelitian ini hanya terdiri dari 2 variabel bebas, yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi variabel terikat akuntabilitas kinerja instansi .
2. Selama proses pengambilan data, informasi yang diberikan kepada responden melalui kuesioner kadang-kadang tidak mencerminkan pendapat mereka yang sebenarnya. Ini terjadi karena pemikiran, anggapan, dan pemahaman masing-masing responden yang berbeda, serta faktor lain, seperti kejujuran responden saat mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.(2016). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (2019). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- _____ (2020). Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta
- Appley A, Lawrence, Lee, Oey, Liang. 2010. Pengantar Manajemen. Jakarta. Salemba Empat
- Agus, Harjito dan Martono. (2021). Manajemen Keuangan. Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Penerbit EKONISIA.
- Bastian, Indra. (2005). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Bastian, Indra dan Suryadi Saat. (2015). Akuntansi sektor publik : suatu pengantar Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Elvera dan Astarina, Yesita. (2021). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset
- Ghozali, Imam. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS, 26 Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gie, The Liang. (2009). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Modern Liberty
- Gitman, Lawrence J dan Chad J. Zutter. (2015). Principles of Managerial Finance. 13th Edition. Global Edition: Pearson Education Limited.
- Horne V. James dan John M Wachowicz. (2011). Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Fundamental of Financial Management). Edisi 12. Diterjemahkan oleh Dewi Fitriani. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2012). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (Edisi 13). Jakarta : Salemba Empat
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan. Edisi 1. Uwais Inspirasi Indonesia.
- James C. Van Horne, J. M. W., Jr. (2013). Fundamentals of Financial Management = Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan. Buku 1-Ed.12. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2014). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- _____. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI Offset
- Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik.

- Edisi 3 Cet 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN . (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Rev. Yogyakarta :: UII Press..
- Mestone, Muhammad. (2008). Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rajawali.
- Martono, Nanang.(2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Masri, Singarimbun dan Sofian Effendi, (2015). Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ESPriyatno, D. (2018). SPSS Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Prihadi, Toto. (2014). Memahami Laporan Keuangan Sesuai IFRS dan PSAK. Jakarta: PPM . (2019). Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Imam & Madiistriyatno, Harries. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Tangerang: Indigo Media.
- Singarimbun, M & Effendi, S.(2011). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3S
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Siregar, Sofyan. (2017). Statistika Deskriptif Untuk Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Stephen, R., & Coulter, M. (2005). Management. Pearson Prentice
- Terry, George R; Rue, Leslie W; Ticoalu, G.A. (2016). Dasar-dasar manajemen. penerjemah, G.A. Ticoalu. Jakarta : Bumi Aksara,.
- Van Horne, James C. and Wachowicz, J.M. (2016). Prinsip Prinsip Manajemen Keuangan, Edisi 13, Buku 1, Jakarta, Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Annisa Ayu Riyani, Tituk Diah Widajanti, 2022. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi kasus pada Pemda Jawa Timur). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 6 No. 2, 2022.
- Andi Ahmad Yani . (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, konsep value for money, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di era digital (di badan keuangan dan aset daerah (bkad) provinsi sulawesi selatan). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Basri, Hasan & Siti-Nabiha, A.K.. (2015). Accountability Of Local Government: The Case Of Aceh Province, Indonesia. Asia Pacific Journal of Accounting and Finance. 3. 1-14.
- Dito Aditia Darma Nst, 2019. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, Vol. 9 No.2 Februari 2019.
- Fika Mudrikah, Karnila Ali , 2020. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Skpd Kabupaten Lampung Timur). Jurnal Keuangan dan Perbankan (Fiducia), Vol. 3 No.2, 2020.
- Hari Munira. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Dpkad) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178. 8
- Nugraeni, B. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas. *JDEB*, 12(1), 18–32. 6
- Nining Asniar Ridzal, 2020. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. *Financial, Jurnal Akuntansi*, Volume 6-Nomor 1, Juni 2020.
- Pratiwi, R. D., & Setyowati, L. (2017). Determinan yang Mempengaruhi Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 94–102.
- Safkaur, O., Afiah, N. N., Poulus, S., & Dahlan, M. (2019). the Effect of Quality Financial Reporting on Good Governance. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 277–286.
- Winda, dkk.2023. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, Vol.18, No.1, April, 2023.
- Widiya (2019). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
